



## Modal Sosial Bentukan Dalam Penyelesaian Konflik di Bangka Belitung

Iskandar Zulkarnain<sup>1</sup>, Aimie Sulaiman<sup>2</sup>, dan Fitri R Harahap<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

<sup>2</sup>Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

<sup>3</sup>Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

### ABSTRACT

*Three potential conflicts that need to be anticipated in the reality of the life of the Bangka Belitung community in the future. The results of qualitative research through conflict mapping in seven districts / cities showed the potential for economic conflict in fighting for tin resources, agrarian conflicts with development dimensions related to land expansion for large-scale oil palm plantations, and inter-village and interethnic youth conflicts became the dominant issue. The mechanism of the safety valve as a damper of potential recurring conflicts must be institutionalized through functional and sustainable formalized social capital.*

*Keywords: conflict, formalized social capital, institutionalization, and safety valve*

### ABSTRAK

Tiga konflik potensial yang perlu diantisipasi di dalam realitas kehidupan di masyarakat Bangka Belitung di masa depan. Hasil dari penelitian kualitatif melalui pemetaan konflik di tujuh distrik / kota menunjukkan potensi konflik ekonomi terhadap sumber daya timah, konflik agrarian dengan dimensi pembangunan yang terhubung dengan ekspansi skala besar penanaman sawit, dan konflik antar pemuda desa dan etnis menjadi isu dominan. Mekanisme katup penyelamat sebagai pengatur kemunculan konflik harus terlembaga/atau terinstitusi melalui modal sosial bentukan yang berkelanjutan dan fungsional

Kata kunci : konflik, modal sosial bentukan, institusionalisasi, keamanan terpusat



## I. PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak memaparkan bagaimana mengelola modal sosial bentukan melalui usaha menggali kearifan lokal sebagai kekuatan bersama dalam menghadapi konflik dan menyatukan segenap elemen masyarakat. Modal sosial dimaknai sebagai upaya menghimpun semua kekuatan-kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya (Lawang, 2004). Konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, setiap individu dapat bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan kesulitan yang besar. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah. Tulisan ini fokus pada upaya pemanfaatan modal sosial (baca kearifan lokal) dalam penyelesaian konflik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun terakhir.

Globalisasi yang sedang melaju deras melalui arus investasi, kecanggihan teknologi, persebaran informasi, dan perluasan pasar membawa konsekuensi bagi bangunan demokrasi Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat majemuk. Ciri utama masyarakat majemuk menurut Novri Susan (Susan, 2012) adalah masyarakat yang disusun berdasarkan perbedaan identitas sosial (keagamaan, etnis, profesi) dan berbagai kelompok sosial yang mendefinisikan diri secara unik dan berbeda dari kelompok lain. Sebagai masyarakat majemuk, Bangka Belitung dengan luas wilayah daratan 16.424 km<sup>2</sup> dan luas lautan 65.301 km<sup>2</sup> berpenduduk 1.430 juta jiwa, tersebar di tujuh kabupaten/kota terdiri dari masyarakat yang beragama dan multietnis (BPS, 2018). Secara geografis, bentangan wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan mencerminkan perbedaan-perbedaan kelompok sosial dan secara demografis

menunjukkan keragaman dari sisi agama, etnis, dan sebaran kependudukan serta mata pencaharian. Jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung tahun 2017 meningkat sebesar 607.927 dimana terdapat sekitar 76,20 ribu penduduk miskin atau sekitar 5,30% dari total penduduk (BPS, 2018).

Secara faktual, Bangka Belitung sedang menuju transisi komoditi dari ekonomi timah ke ekonomi non-timah. Data statistik BPS pada tahun 2017 menunjukkan jumlah perkebunan besar kelapa sawit sebanyak 41 perusahaan dan luas lahan pertanian yang didominasi oleh lahan yang bukan sawah sekitar 1.149.880 hektar atau 97,865% dari total lahan pertanian. Transisi ini secara sosiologis, membawa konsekuensi-konsekuensi bagi peri-kehidupan sosial masyarakat seperti stabilitas, harmoni sosial, dan persaingan identitas dalam ruang kehidupan sehari-hari. Salah satu indikatornya ditandai oleh meningkatnya jumlah kasus konflik dan kekerasan di dalam ruang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya kebangsaan (Susan, 2009). Peningkatan jumlah kasus konflik dan kekerasan di Bangka Belitung sejak lima tahun terakhir disebabkan oleh disfungsi dua komponen penting yakni “lenyapnya katup penyelamat (*safety-valve*) dalam sistem sosial masyarakat yang bisa mengelola konflik menjadi nirkekerasan dan tidak berfungsinya mekanisme resolusi konflik yang diterima oleh masyarakat yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga modern seperti polisi/tentara, birokrasi, dan pengadilan” (Laporan Kesbangpol, 2013). Menurut Coser, katup penyelamat adalah “suatu lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang akan mempertahankan integrasi suatu masyarakat” (Susan, 2012).

Tulisan ini hendak menjawab bagaimana usaha menciptakan katup penyelamat yang fungsional sebagai manifestasi modal sosial bentukan. Modal sosial bentukan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di perdesaan maupun perkotaan selalu berkembang dan terkadang mengalami modifikasi, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sarat makna



seperti kekerabatan, keakraban, kebersamaan, toleransi, dan kerja sama. Nilai-nilai budaya yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat di Bangka Belitung saat ini diharapkan menjadi modal dalam penyelesaian konflik sosial dan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi pemetaan konflik model SIPABIO (Susan, 2009). Strategi SIPABIO menitikberatkan pada upaya mengurai sumber-sumber konflik (*Source*), isu-isu (*Issue*), pihak-pihak yang terlibat (*Parties*), sikap (*Attitudes*), perilaku/tindakan (*Behaviour*), intervensi dari pihak lain (*Intervention*). Kesemua proses itu turut menentukan hasil akhir penyelesaian konflik (*Outcome*). Teknik pengumpulan data lebih ditekankan pada wawancara, diskusi terfokus, dan analisis dokumentasi yang bersumber dari pemberitaan di media lokal. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat/adat, camat, dan kepala desa di setiap kecamatan di tujuh kabupaten/kota di Bangka Belitung. Diskusi difokuskan untuk menjangkau aspirasi, saran, dan masukan, sedangkan dokumentasi dijadikan alat pendukung bagi validitas data dan informasi terkait peristiwa konflik yang sedang terjadi melalui penelusuran surat kabar lokal seperti Babel Pos dan Bangka Pos.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Konflik di Bangka Belitung

Secara ringkas, gambaran konflik di Bangka Belitung yang disajikan dalam tulisan ini, merupakan hasil pemetaan yang bersifat kolaborasi. Hasil pemetaan konflik merupakan kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Universitas Bangka Belitung di tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Peta konflik di tujuh kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel Peta Konflik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Peta Konflik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Politik	4	7	2	.	2	5	.
Ekonomi	12	9	7	9	10	3	12
Sosbud	.	7	2	3	4	3	2
Ideologi	3	2	.	.	.	1	.
Batas Wilayah	1	2	1	1	1	3	1
Pertanahan	2	9	1	.	.	.	3
n							

Sumber data: Clara Data Primer

Hasil pemetaan konflik di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan tiga kecenderungan. Pertama, konflik yang terjadi bersumber dari faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. Faktor ekonomi terkait erat dengan persoalan perebutan arena dan kesempatan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya timah, baik penambangan timah di darat maupun di laut. Fenomena konflik ini terjadi di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Kasus Berman Bangka Tengah menjadi salah satu kasus konflik yang menarik diangkat, karena selain sentimen ekonomi, isu konflik juga mengarah pada isu-isu baru yang bernuansa konflik identitas (Orang Selapan) yang selanjutnya menyebar ke daerah-daerah lain. Di beberapa tempat terjadi semacam sentimen terhadap keberadaan Orang



Selapan yang mulai mengarah pada aksi balas dendam.

Kasus yang melanda nelayan tradisional di Toboali Bangka Selatan dalam mengakses sumber daya alam di laut seringkali bersinggungan dengan kepentingan penambang timah. Perbedaan sosial berbalut kepentingan-kepentingan kelompok pun mengemuka. Alokasi sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat dikuasai oleh sekelompok orang dan ada banyak orang yang hanya menjadi penonton. Fenomena ini berimplikasi pada ketidakpuasan dan kecemburuan yang akhirnya melahirkan gerakan-gerakan yang merusak *equilibrium* masyarakat, diantaranya masyarakat nelayan yang melakukan aksi penolakan dan penyelamatan ekosistem laut. Laut sebagai modal sosial bagi masyarakat nelayan yang mendiami daerah pesisir yang ada di perairan Toboali, menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak karena adanya penambangan laut. Konflik di sektor kelautan merupakan fenomena yang kerap terjadi sebagai konsekuensi laut sebagai sumber daya yang bersifat *open acces* yang mengakibatkan terbukanya ruang untuk perbedaan kepentingan (Annisa, Satria, dan Kinseng, 2009). Perbedaan kepentingan itu yang memicu konflik antara komunitas nelayan di Toboali dengan korporasi kapal isap dan penambang TI Apung.

Kedua, sengketa pertanahan menjadi sumber konflik yang sedang marak terjadi. Kasus sengketa lahan dominan terjadi di Kabupaten Bangka. Sebagai contoh, konflik tenurial dengan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu yang diawali dengan penjualan lahan warga ke pihak PT GPL yang kemudian memantik aksi penolakan oleh warga setempat yang masih tergolong komunitas adat. Konflik lahan di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda telah berlangsung cukup lama dan sejak tahun 2009 masyarakat bersepakat untuk menolak pembukaan perkebunan kelapa sawit milik PT GPL. Penolakan itu disampaikan dalam

bentuk musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat Gunung Muda. Alasan penolakan antara lain disebabkan oleh Desa Gunung Muda merupakan salah satu daerah yang memiliki Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang kehidupan dan budaya mereka sangat tergantung dengan alam terutama hutan.

Fenomena konflik pertanahan yang terjadi di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu menandakan bahwa telah terjadi fenomena industrialisasi yang lebih mengedepankan kepentingan pembangunan yang melahirkan perubahan sosial yang menyangkut sistem nilai, norma, perilaku, organisasi, lembaga sosial, kekuasaan, dan interaksi sosial. Dalam aspek perilaku, sebagian masyarakat atau komunitas tidak lagi memandang tanah dalam fungsi sosialnya sebagai tempat bercocok tanam, tetapi mulai cenderung ke fungsi individual. Fungsi individual terindikasi dengan adanya pembebasan atau penjualan tanah yang dimaknai sebagai sumber akumulasi baru (Yusriyadi, 2010). Perubahan perilaku ini semakin memperkuat posisi negara (Pemda) untuk menguasai tanah-tanah demi kepentingan pembangunan termasuk untuk industri perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.

Ketiga, konflik yang bersumber dari masalah sosial budaya. Masalah ini dipicu oleh perkelahian antardesa maupun antarsuku (pribumi dan pendatang) yang seringkali melibatkan pemuda dan warga masyarakat, dilatarbelakangi masalah dendam dan kecemburuan sosial. Fenomena ini ditemukan di beberapa kabupaten seperti Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Konflik sosial budaya yang cukup dominan terjadi di Kabupaten Bangka Selatan disebabkan oleh perkelahian kelompok pemuda antar desa dan antarpemuda satu desa yang berbeda etnis. Pemicu utamanya masalah kenakalan remaja yang terjadi saat hiburan malam yang menampilkan grup musik/band.

Konflik sosial yang diikuti dengan aksi kekerasan dalam bingkai konflik antar kelompok atau antar komunitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti



eksistensi identitas budaya kelompok atau komunitas (Roslinawati, 2012). Identitas budaya yang dimaksud adalah identitas yang menyatukan dan mengikat antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dalam sebuah ikatan kelompok, cenderung diikat oleh identitas administratif wilayah pemerintahan, baik dusun, desa atau kelurahan. Menguatnya sentimen kesamaan administratif membuat antar kelompok saling membantu dan saling membela, terlepas yang dibantu atau dibela itu benar atau salah. Fenomena ini kemungkinan berpotensi berulang, mengingat secara psikologis dialami oleh kelompok pemuda yang memiliki tingkat emosi yang tinggi dan kultur masyarakat yang cenderung kurang peduli dengan masalah kenakalan remaja.

### *B. Kearifan Lokal Sebagai Katup Penyelamat*

Konflik yang dilatarbelakangi persoalan ekonomi terkait akses sumber daya timah, akses terhadap tanah untuk perkebunan kelapa sawit, dan perkelahian remaja/pemuda antardesa, memungkinkan antarpihak yang berkonflik menyertakan identitas-identitas tertentu (agama, etnis, profesi). Identitas inilah yang selanjutnya menjadi pembeda yang membedakan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Keliyatan (*the others*) semakin menguat ketika dibenturkan dengan kepentingan *in group* dan *out group*. Persoalan berikutnya, bagaimana perbedaan-perbedaan ini dapat dijadikan sebuah spirit bagi kelompok-kelompok yang ada, sehingga dari dalam kelompok tersebut muncul kearifan yang dapat dijadikan sebagai nilai bagi kelompoknya.

Secara umum kearifan setempat (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Laporan Dinkessos, 2014). Kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Gobyah dalam Dinkessos, 2014). Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya

masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun ia bernilai lokal, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Pada aras inilah kearifan lokal dapat difungsikan agar nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya dapat menjadi acuan baik sebagai pengontrol sosial maupun sebagai pengikat hubungan sosial dalam sebuah masyarakat yang berkonflik.

Beberapa contoh kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih bertahan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berikut ini dapat dijadikan sebagai katup penyelamat. Pemetaan kearifan lokal ini merupakan kerja sama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Bangka Belitung dan Universitas Bangka Belitung. Pertama, musyawarah mufakat dalam tradisi Maras Tahun. Tradisi Maras Tahundi Belitung dan Belitung Timur, dengan menempatkan peran dukun kampung sebagai pranta adat dan peran Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya sebagai pranata desa yang saling membentuk hubungan simbiosis-mutualistik dalam memantau, mengontrol, memfasilitasi potensi konflik dan lain-lain, dijalankan berdasarkan mekanisme yang selaras (tidak ada tumpang-tindih peran) dan berasaskan musyawarah-mufakat, menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat kampung. Proses dan mekanisme adat musyawarah dalam Maras Tahun dengan memberi ruang bagi semua elemen masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menyampaikan berbagai masalah, keluhan, saran/masukan yang bersifat konstruktif, secara tidak langsung akan mendukung dan menguatkan harmoni sosial di masa akan datang. Terbukanya ruang kebersamaan dan keterbukaan dalam menyikapi dinamika persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik yang diperankan oleh pranata adat, menunjukkan bahwa pranata adat musyawarah yang bersifat non-formal berfungsi



mengintegrasikan elemen-elemen masyarakat menurut strata sosial masing-masing sekaligus menerapkan fungsi mencegah meluasnya konflik dan menyelesaikan konflik (menciptakan perdamaian). Salah satu indikator yang memperkuat argumen tersebut adalah bahwa hampir semua elemen masyarakat kampung menerima penggunaan pranata adat musyawarah pada acara Maras Tahun sebagai media resolusi konflik.

Di Desa Rukam dan Desa Tumbak Petar Kabupaten Bangka Barat terdapat kearifan lokal terkait dengan pengelolaan tanah desa dan penambangan timah inkonvensional (TI) untuk kepentingan masyarakat lokal. Dalam pengelolaan tanah, pihak desa membuat aturan tentang pengadaan tanah desa yang pengelolannya diserahkan kepada aparat desa dan masyarakat seperti pengelolaan tanah desa untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pihak desa juga mulai menata aturan tentang kepemilikan dan penguasaan tanah bagi warga pendatang (dari luar daerah Bangka Belitung), meskipun kebijakan itu belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dalam pengelolaan aktivitas pertambangan khususnya TI, kebanyakan warga pendatang memiliki akses dalam kepemilikan TI. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti halnya konflik sosial yang bersifat horizontal, terdapat mekanisme yang cukup unik berkembang dalam dinamika kehidupan sosial di kalangan warga pendatang. Meskipun warga pendatang sebagai pemilik TI, muncul sebuah kesadaran di kalangan pendatang yang mendorong sebagian besar mereka untuk menjadikan warga lokal sebagai tenaga kerja dalam mengoperasikan TI tersebut. Kesadaran itu diperluas ke aspek perilaku pemilik TI yang dengan terbuka menyumbangkan sebagian hasil keuntungan timah guna membantu kegiatan masjid dan sarana pendidikan.

Kedua, pelestarian *kelekak*. *Kelekak* merupakan suatu kearifan lokal yang unik di Desa Ketap Bangka Barat dan Riau Silip Kabupaten Bangka. Unik tidak saja disebabkan oleh adagiumnya “kelak untuk

ikak” yang memiliki dimensi masa depan (modal sosial), tetapi juga lebih menekankan pada aspek penguatan makna kekerabatan. Dalam pandangan masyarakat, *kelekak* tidak hanya dipandang sebagai sebuah gugusan hutan yang ditanami tumbuh-tumbuhan keras seperti durian, duku, cempedak, manggis, binjai, bacang, rambutan dan lain-lain, tetapi juga dianggap bernilai kebersamaan untuk saling memiliki, menjaga dan menghormati lingkungan sebagai sumber penghidupan antar-generasi.

Di Riau Silip, sebagian besar penduduknya bertani dan disela-sela waktu kosong mereka memiliki pekerjaan sambilan diantaranya menjadi buruh di tambang atau pemilik tambang inkonvensional. Menariknya, apapun pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat setempat, namun kearifan mereka untuk mempertahankan tanah sebagai modal sosial berupa *kelekak* sampai sekarang masih terus dipertahankan. Dengan kata lain, walaupun ada lahan-lahan yang mereka manfaatkan untuk TI, tetapi mereka masih menyisakan lahan-lahan yang bisa mereka garap sebagai kebun atau ladang untuk investasi masa depan demi kelangsungan keturunannya.

Tradisi *hutan iding* (hutan larangan) di Belitung terus dipertahankan. Pemahaman masyarakat Belitung mengenai *hutan iding* adalah hutan yang berada di antara tanah/lahan yang disengketakan antara dua pihak. Jika sengketa antara keduanya tidak dapat diselesaikan bahkan berlarut-larut, dengan menjadikan tanah atau lahan yang disengketakan menjadi milik bersama (kedua pihak yang bersengketa). Dengan kata lain, *hutan iding* memberi ruang bagi kedua pihak yang bersengketa untuk mengelola, memanfaatkan tanah/lahan secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama.

*Hutan iding* secara umum dimaknai masyarakat sebagai hutan larangan. Kenapa terlarang, *pertama*, terlarang karena tanah atau lahannya menjadi milik bersama atas nama komunitas dimana lokasi lahan atau tanah tersebut berada. *Kedua*, larangan memiliki makna upaya menjaga tanah atau lahan tersebut bebas dari jamahan atau



perambahan hutan. Ide atau gagasan ini tentunya sarat nilai dimana komunitas dengan caranya membangun kearifan lokal sebagai bukti bahwa sesungguhnya masyarakat memiliki *indigenous knowledge* yang sangat baik dalam menjaga keseimbangan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budayanya. Pengetahuan indigenous yang dapat dikaji dalam ide atau gagasan ini adalah peran dukun kampung dimana mereka menyakini bahwa air, hutan dan gunung/bukit adalah batas perdukunan. Bila batas-batas tersebut dijaga dengan baik, maka harmonisasi dan keseimbangan sosial dapat terjaga.

Ketiga, tradisi *begalor*. *Begalor* dalam bahasa Melayu Belitong berarti bercerita tentang hubungan keluarga atau kekerabatan. Istilah lainnya silaturahmi yang memungkinkan untuk saling mengenal antar sesama anggota kerabat satu dengan anggota kerabat lainnya. Budaya *begalor* dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama, khususnya antar sesama kerabat. Sebab, melalui *begalor* antara satu dengan lainnya dapat saling mengetahui garis keturunan di atas maupun di bawahnya hingga beberapa generasi.

*Begalor* dapat memanfaatkan berbagai momentum seperti perayaan pernikahan, selamat, kematian, kelahiran, syukuran, hari-hari besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Momentum perayaan adalah kesempatan paling terbuka untuk berkumpul bersama, bercengkrama, beramah tamah penuh dengan nuansa keakraban dan santai. *Begalor* tidak hanya dipahami dalam arti sempit, terbatas pada sesama kerabat, tetapi dapat dikembangkan ke arah yang lebih luas, yaitu mengikat persaudaraan antar sesama tetangga, kawan, dan orang lain yang baru dikenal. Dalam praktiknya, *begalor* tidak hanya dikenal di kalangan kaum tua, namun juga dikenal di kalangan muda bahkan anak-anak tingkat sekolah dasar. Membiasakan *begalor* menjadi agenda penting kecamatan Sijuk guna menyelamatkan para remaja dan kaum muda dari budaya-budaya yang bertentangan

dengan etika dan norma sosial keagamaan seperti bertengkar dan berbuat onar.

Berbeda dengan di Desa Air Gegas Bangka Selatan. Tradisi *ngangung* terus dipelihara sebagai upaya memupuk solidaritas antar komponen masyarakat terutama kaum remaja dan pemuda. Tradisi *nganggung* sebagai katup penyelamat mencegah dari keikutsertaan remaja/pemuda dalam keramaian malam dengan menikmati musik/band sebagai pemicu perkelahian dan pertikaian antarremaja/pemuda. Tradisi 'nganggung' ini dijadikan icon Kabupaten Bangka Selatan seperti saat peringatan tahun baru Islam (1 Muharam) dengan *hikok helawang*. Hidangan wajib pada acara 'nganggung' hikok kelawang adalah masakan ayam bakar dan nasi ketan.

#### IV. KESIMPULAN

Konflik sektor ekonomi menyangkut perebutan akses sumber daya alam (timah), sektor agraria terkait akses terhadap tanah/lahan, dan hubungan sosial budaya terkait kenakalan remaja antardesa dan antaretnis akan terus mengancam stabilitas dan harmoni sosial lintas generasi di masa mendatang. Diperlukan modal sosial bentukan yang dapat menangkal potensi konflik yang berulang. Modal sosial bentukan seperti Maras Tahun (dalam arti luas tradisi *public hearing* di level penentu kebijakan) dapat dijadikan spirit bersama untuk menumbuhkembangkan tradisi musyawarah mufakat yang bebas dari kepentingan pragmatis (individu/kelompok tertentu) terutama kepentingan ekonomi pertimahan.

Institusionalisasi *kelekak*, *hutan iding*, dan dukun kampung dapat dijadikan sebagai komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan tanah/lahan sebagai modal sosial (investasi) sekaligus katup penyelamat dari aktivitas perambahan hutan, perampasan tanah, dan *illegal logging*. Dan terakhir, institusionalisasi lembaga adat dan lembaga taruna sadar konflik lintas desa sebagai wadah stabilitas dan penguatan integrasi sosial antardesa dalam mengatasi masalah kenakalan remaja.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annisa, Luluk, dan Satria, Arif dan Kinseng Rilus A. (2009). *Konflik Nelayan di Jawa Timur: Studi kasus Perubahan Struktur dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Nelayan di Lekok, Pasuruan* dalam Jurnal Sodality, Vol. 03, No. 01, April 2009, hal. 113.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2018). *Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018*. Terbitan BPS Provinsi Bangka Belitung (via online).
- [3] Lawang, Robert M.Z. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Gramedia, Jakarta.
- [4] Laporan Pemetaan Jenis dan Sumber Konflik di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013. Kerjasama Universitas Bangka Belitung dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Bangka Belitung. Laporan tidak Dipublikasikan.
- [5] Laporan Kegiatan Pemetaan Potensi Kearifan Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014. Kerja sama Universitas Bangka Belitung dan Dinas Kesejahteraan Sosial Bangka Belitung. Laporan tidak dipublikasikan.
- [6] Roslinawaty.(2012). *Maraknya Konflik Sosial Antar Warga (Desa) dan Upaya Penanganannya*. Prosiding Kecerdasan Sosial Mengelola Konflik Seri Konflik Industrial, Politik dan Demokrasi. Unsri Press, Palembang.
- [7] Susan, Novri. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Kopi Bekerja Sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [8] Susan, Novri.(2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [9] Yusriyadi.(2010). *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Genta Publishing, Yogyakarta.